

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

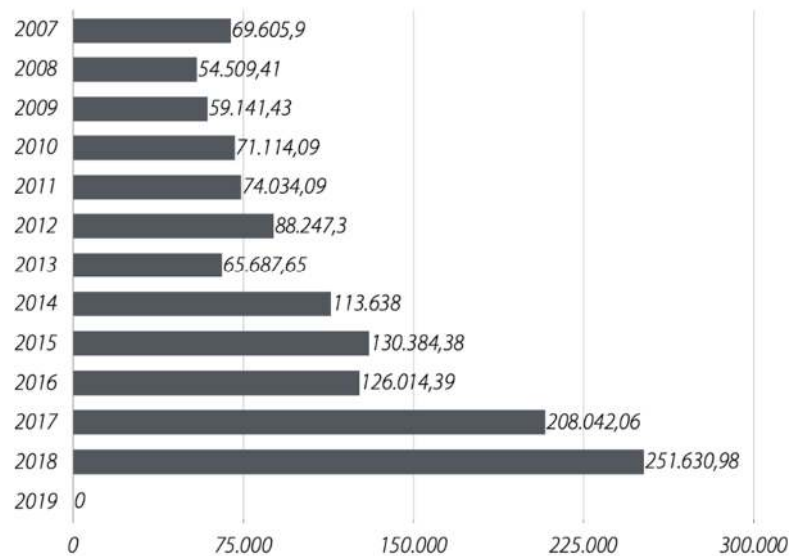
Indonesia ialah negara agraris dikarenakan sekitar 70% penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Kondisi seperti ini mengakibatkan peranan dalam sektor pertanian menjadi prioritas mata pencaharian penduduk Indonesia. Peran sektor pertanian untuk Produk Domestik Bruto (PDB) dipridiksikan akan terus menurun di masa yang akan datang. Hal ini harus dilakukan pencegahan menggunakan cara meningkatkan produksi pertanian baik secara kualitas ataupun kuantitas (Roidah, 2013).

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian adalah menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor non migas. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini (Sadono, 2008).

Pertanian organik diketahui manusia yaitu saat ilmu bercocok tanam dilakukan oleh nenek moyang kita. Pada waktu itu segalanya ditertapkan dengan cara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami. Seiring perkembangan ilmu pertanian dan jumlah populasi manusia maka kebutuhan pangan juga meningkat. Saat revolusi hijau di Indonesia yang memberikan hasil signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Penggunaan pupuk sintetis, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi (*high yield variety*), penggunaan pestisida, intensifikasi lahan mengalami peningkatan. Namun dengan perkembangan jaman, belakangan ini banyak ditemukan berbagai permasalahan akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian yaitu pencemaran oleh pupuk kimia dan pestisida kimia akibat pemakaian bahan-bahan tersebut secara berlebihan dan berdampak terhadap penurunan kualitas

lingkungan dan kesehatan manusia akibat tercemarnya bahan-bahan sintesis tersebut (Roidah, 2013).

Menurut Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) (2019), Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan jumlah luasan lahan bersertifikasi organik. Jumlah luasan pertanian organik dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah luasan pertanian organik (Ha) per tahun

Sumber : Kompilasi data SPOI 2007-2018 dari FiBL

Gambar 1, menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah luasan lahan bersertifikasi organik disebabkan oleh banyak faktor, sebagai contoh untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah masa dimana adanya akreditasinya 7 Lembaga sertifikasi, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah lahan yang tersertifikasi. Namun untuk tahun 2011-2014 terjadi fluktuasi lahan dikarenakan beberapa operator tidak memperpanjang sertifikasinya dan juga beberapa komoditas panen liar menjadi primadona. Peningkatan jumlah luas lahan pertanian organik dari tahun 2016 ke 2017 sekitar 39,4 % dan peningkatan luas lahan pertanian organik di tahun 2017 dan 2018 sekitar 17,3 %. Sementara itu jumlah operator yang terlibat dalam kegiatan pertanian organik relatif stabil di angka 18.000 produser yang tersebar di berbagai komoditas (SPOI, 2019).

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah mengembangkan pertanian organik. Salah satu komoditas yang sedang dikembangkan adalah padi organik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung tahun 2017, pembudidayaan padi secara organik sudah dilakukan di empat kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Pringsewu.

Budidaya padi organik mengutamakan potensi lokal dan ramah lingkungan sehingga akan sangat mendukung terhadap pemulihan kesehatan tanah dan kesehatan pengguna produknya serta memiliki nilai jual yang tinggi dan menguntungkan petani (Hasanuddin, Silviyanti, & Yanti, 2017). Luas lahan, produksi, dan produktivitas padi organik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas lahan, produksi, dan produktivitas padi organik Provinsi Lampung Tahun 2017

No	Kabupaten	Padi Organik		Produktivitas
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	
1	Lampung Barat	0	0	0
2	Tanggamus	27,5	137,5	5
3	Lampung Selatan	2	0,6	4,8
4	Lampung Timur	0	0	0
5	Lampung Tengah	1,28	7,04	5,5
6	Lampung Utara	0	0	0
7	Way Kanan	0	0	0
8	Tulang Bawang	0	0	0
9	Pesawaran	0	0	0
10	Pringsewu	50	245,15	4,9
11	Mesuji	0	0	0
12	Tulang Bawang Barat	0	0	0
13	Pesisir Barat	0	0	0
14	Kota Bandar Lampung	0	0	0
15	Metro	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung,

2017

Tabel 1 menunjukkan luas lahan dan produksi padi organik terbanyak yaitu 50 Ha di wilayah Kabupaten Pringsewu dengan produktivitas 245,15 Ton. Selain untuk padi, pupuk organik dapat digunakan untuk tanaman lainnya seperti tanaman hortikultura, dan perkebunan. Pupuk organik selain untuk tanaman organik baik juga untuk tanaman non organik dan semi organik, yang dapat menjaga unsur hara tanah untuk jangka panjang. Meningkatnya usaha pertanian organik, semi organik, dan non organik di Lampung adalah peluang bisnis untuk usaha produksi pupuk organik. Luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Lampung tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas padi sawah di Lampung menurut Kab/Kota Tahun 2015 (ton).

Wilayah	Padi Sawah (Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas)		
	Tahun 2015		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Lampung Tengah	138.807	780.924	56,26
Lampung Timur	110.099	567.447	51,54
Lampung Selatan	88.129	478.760	54,32
Tanggamus	50.083	290.615	58,03
Tulang Bawang	50.060	235.444	47,03
Mesuji	39.246	180.121	45,9
Pesawaran	30.733	169.830	55,26
Lampung Utara	33.011	161.851	49,03
Way Kanan	31.944	156.811	49,09
Pringsewu	23.611	140.926	59,69
Lampung Barat	23.854	115.644	48,48
Tulang Bawang Barat	18.159	92.408	50,89
Pesisir Barat	15.473	80.927	52,3
Metro	5.676	35.077	61,8
Bandar Lampung	1.675	35.077	61,8
Provinsi Lampung	660.560	3.496.489	52,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015

Provinsi Lampung memiliki penyebaran luas lahan tanaman padi yang tersebar di seluruh kabupaten. Terdapat beberapa cara dalam pengembangan budidaya padi di Lampung, diantaranya dengan cara organik maupun non-organik. Rata-rata masyarakat di semua kabupaten menanam padi dengan budidaya non-organik atau masih menggunakan bahan-bahan kimia. Akan tetapi, terdapat empat kabupaten yang menanam padi secara organik, salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu yang mendapat peringkat ke 10 dalam produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015 (BPS Provinsi Lampung, 2016).

CV Palugada Sukses Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk organik yang memiliki tujuan memberikan alternatif kepada para petani agar dapat memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Perusahaan tersebut berlokasi di Desa Totokaton, Kecamatan Pungur, Kabupaten Lampung Tengah. Pupuk organik adalah bahan organik atau bahan karbon, pada umumnya berasal dari tumbuhan dan/atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan/atau hewan (Sutanto, 2002).

CV Palugada Sukses Bersama merupakan perusahaan swasta yang mendukung program pemerintah dalam menggalakan pemakaian pupuk organik di lingkungan masyarakat petani Indonesia dengan menjalin kemitraan bersama perusahaan milik BUMN yaitu PT Petrokimia Gresik.

Perusahaan PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertanian dan bertugas untuk tetap membantu menstabilkan ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia, produk yang dihasilkan yaitu berbagai macam pupuk organik.

Masalah CV Palugada Sukses Bersama dalam menjalani bisnisnya yaitu dalam memasarkan hasil produk pupuk organiknya, sehingga dalam hal ini CV Palugada Sukses Bersama mengambil langkah untuk menjalin kerjasama (kemitraan) dengan PT Petrokimia Gresik. Kendala pemasaran CV Palugada Sukses Bersama dalam memasarkan pupuk organiknya adalah ketidakpastian pasar (harga, jumlah, kualitas, sasaran pasar).

CV Palugada Sukses Bersama menjalin kerjasama mitra dengan PT Petrokimia Gresik dalam mengatasi permasalahan ketidakpastian pasar (harga, jumlah, kualitas, sasaran pasar). Syarat menjadi mitra binaan PT Petrokimia Gresik antara lain: 1) Calon mitra binaan (MB) dengan usaha: industri, perdagangan, usaha tani (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), jasa. 2) Memiliki nilai aset maksimal Rp500 juta (keterbatasan rupiah) atau omset per tahun maksimal Rp2,5 miliar (batas umum rupiah). Kemitraan merupakan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik (Raharjo, 2018).

Untuk itu dilakukan pemilihan pola kemitraan yang tepat dan menguntungkan untuk kedua perusahaan, kemitraan dilakukan dengan menggunakan pola kemitraan sub kontrak. Pola kemitraan sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya (Harisman, 2017). Untuk menjadi mitra PT Petrokimia Gresik adanya persyaratan, salah satu syarat untuk dapat bekerjasama yaitu dapat melaksanakan alur standar produksi mitra Petrokimia yang ditetapkan oleh PT Petrokimia Gresik. Menurut Fitri *et al.* (2015), proses produksi pupuk organik granul dengan bahan baku kotoran sapi dan kotoran ayam diawali dengan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Proses kedua adalah proses pencampuran bahan hasil fermentasi dengan bahan tambahan berupa dengan kapur pertanian yaitu kalsium karbonat. Proses ketiga adalah proses penghalusan bahan baku. Bahan baku berupa kotoran ternak kemungkinan tercampur dengan bahan pakan berupa jerami sehingga perlu dihaluskan. Proses keempat adalah membentuk pupuk menjadi granul. Proses kelima adalah proses pengeringan untuk mengurangi kadar air pada pupuk. Proses keenam adalah proses pengayakan guna mendapatkan ukuran pupuk organik granul yang seragam. Ukuran pupuk yang terlalu besar akan kembali dihancurkan dan digranulasi

ulang untuk menyeragamkan ukuran pupuk granul. Proses ketujuh adalah pendinginan untuk menurunkan suhu pupuk organik sebelum proses pengemasan.

Dalam hal ini CV Palugada Sukses Bersama bertanggung jawab memproduksi pupuk Petroganik dan PT Petrokimia Gresik menampung hasil produksi pupuk petroganiknya, adanya pembinaan yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik agar meningkatkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antar perusahaan. Pembinaan yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik yaitu kontrol mengenai kualitas pupuk yang diproduksi agar menghasilkan produk yang baik dan sesuai standar yang berlaku.

1.2 Tujuan

Penulisan laporan Tugas Akhir berjudul Pola Kemitraan CV Palugada Sukses Bersama Dengan PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Menguraikan alur standar produksi mitra pupuk Petroganik CV Palugada Sukses Bersama dengan PT Perokimia Gresik.
2. Menggambarkan dan menjelaskan pola kemitraan di CV Palugada Sukses Bersama dengan PT Perokimia Gresik.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan langkah-langkah kemitraan di CV Palugada Sukses Bersama dengan PT Perokimia Gresik.

1.3 Kerangka Pemikiran

CV Palugada Sukses Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis yang memproduksi pupuk organik. Produk pupuk organik yang diproduksi oleh CV Palugagada Sukses Bersama merupakan jenis pupuk organik granul mempunyai merek dagang "PETROGANIK". Dilatar belakangi oleh persoalan ketidakpastian pasar baik jumlah, kualitas sasaran pasar, maka kemitraan menjadi solusi persoalan tersebut. CV Palugada Sukses Bersama menjalin kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik untuk melakukan proses pemasaran produk pupuk organik yang diproduksi oleh perusahaan. CV Palugada Sukses Bersama memiliki permasalahan

dalam memasarkan produk pupuk organiknya, sehingga perusahaan mengambil langkah untuk bermitra dengan PT Petrokimia Gresik untuk mendapatkan jaminan pemasaran. Dari sisi lain PT Petrokimia Gresik mempunyai permasalahan dalam kekurangan stok pupuk Petroganik, sehingga PT Petrokimia Gresik melakukan kerjasama mitra dengan CV Palugada Sukses Bersama untuk memenuhi produk pupuk Petroganik.

Kerjasama antara CV Palugada Sukses Bersama dan PT Petrokimia Gresik adalah dalam bentuk kemitraan yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak perusahaan. Kedua belah pihak dalam bermitra mempunyai jangka waktu kerjasama yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut.

CV Palugada Sukses Bersama akan dikunjungi oleh supervisi dari PT Petrokimia Gresik untuk melakukan pengecekan peralatan pabrik apakah sesuai dengan standar PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya melakukan *performance test* produksi di pabrik CV Palugada Sukses Bersama. Analisa produk Petroganik dilaksanakan dengan mekanisme 3:1, dimana mitra wajib melaksanakan analisa mutu di lembaga pengujian mutu yaitu Balittanah setelah 3 kali melakukan analisa di lab non Balittanah, setelah melakukan analisa lembaga pengujian mutu akan mengeluarkan CoA (*Certificate of Analysis*). Produk yang telah bersertifikat dan memenuhi persyaratan mutu Petroganik selanjutnya PT Petrokimia Gresik akan menerbitkan PO (*Purchase Order*). Dalam bermitra semua proses terkadang tidak berjalan dengan baik dan ada permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu jangka waktu yang lama pengambilan produk pupuk yang siap diangkut oleh PT Petrokimia Gresik dikarenakan produk pupuk Petroganik belum memenuhi target yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu 1500 ton per semester (6 bulan), target produksi tidak sesuai disebabkan oleh CV Palugada Sukses Bersama yang mengalami masalah dalam permodalan, sehingga dalam jumlah produk yang dihasilkan belum memenuhi target. Kerangka pemikiran Pola Kemitraan CV Palugada Sukses Bersama Dengan PT Petrokimia Gresik dilihat pada Gambar 2.

1.4 Kontribusi

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hubungan kemitraan bagi beberapa pihak antara lain:

1. Pembaca

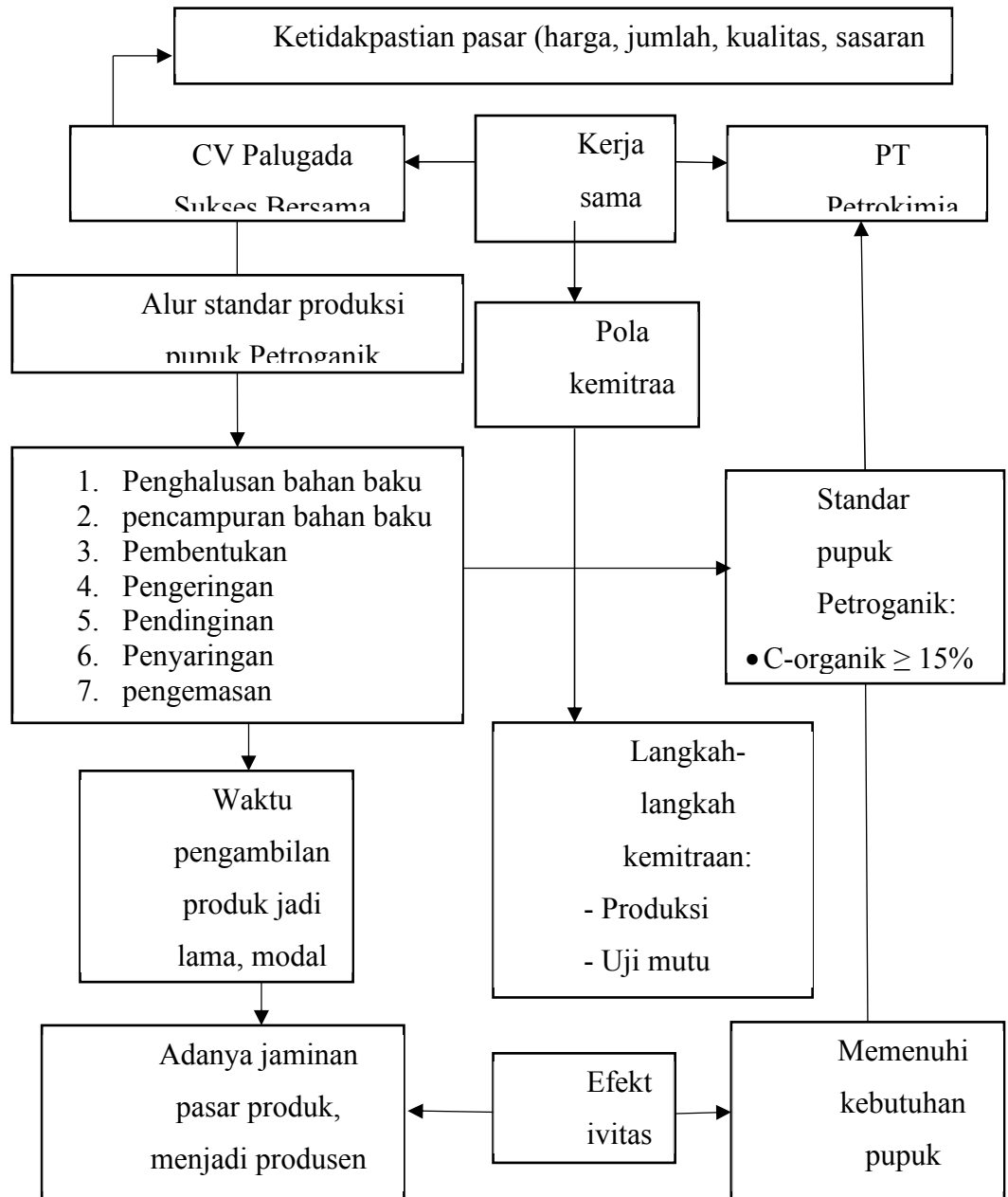
Laporan Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai hubungan kemitraan antara perusahaan CV Palugada Sukses Bersama dengan mitra PT Petrokimia Gresik dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penulis selanjutnya.

2. Politeknik Negeri Lampung

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi mahasiswa mengenai kemitraan pupuk.

3. CV Palugada Sukses Bersama

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.



Gambar 2. Kerangka pemikiran Pola Kemitraan CV Palugada Sukses Bersama Dengan PT Petrokimia Gresik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pupuk Organik

Definisi yang dikemukakan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) bahwa pupuk organik adalah bahan organik atau bahan karbon, pada umumnya berasal dari tumbuhan dan/atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan/atau hewan (Sutanto, 2002).

Sumber pupuk organik dapat berasal dari kotoran hewan, bahan tanaman dan limbah, misalkan: pupuk kandang (ternak besar dan kecil), hijauan tanaman rerumputan, semak, perdu dan pohon, limbah pertanian (jerami padi, batang jagung, sekam padi, dan lain-lain), dan limbah agroindustri. Tanah yang dibenahi dengan pupuk organik mempunyai struktur yang baik dan tanah yang kecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar daripada tanah yang kandungan bahan organiknya rendah (Sutanto, 2002).

Menurut Sutanto (2002) pupuk organik memiliki karakteristik umum adalah sebagai berikut:

- a) Kandungan hara rendah. Kandungan hara pupuk organik pada umumnya rendah tetapi bervariasi tergantung pada jenis bahan dasarnya. Kandungan hara yang rendah berarti biaya pada setiap unit unsur hara yang digunakan nisbi lebih mahal.
- b) Ketersediaan unsur hara lambat. Hara yang berasal dari bahan organik diperlukan untuk kegiatan mikroba tanah dialihurukan dari bentuk ikatan kompleks organik yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman menjadi bentuk senyawa organik dan anorganik sederhana yang dapat diserap tanaman. Kebanyakan unsur hara di dalam tanah biasanya terdiri dalam bentuk unsur tersedia dari hasil perombakan bahan organik.

- c) Menyediakan hara dalam jumlah terbatas. Penyediaan hara yang berasal dari pupuk organik biasanya terbatas dan tidak cukup dalam menyediakan hara yang diperlukan tanaman.

Sutanto (2002) menjelaskan keuntungan memanfaatkan pupuk organik adalah sebagai berikut:

- a) Mempengaruhi sifat fisik tanah. Warna tanah dari cerah akan berubah kelam. Hal ini berpengaruh baik pada sifat fisik tanah. Bahan organik membuat tanah menjadi gembur dan lepas-lepas, sehingga aerasi dan pengatusan dakhil menjadi lebih baik serta lebih mudah ditebus perakaran tanaman. Pada tanah yang bertekstur pasir, bahan organik akan meningkatkan pengikatan antar-partikel dan meningkatkan kapasitas mengikat air. Sifat fisik bahan organik yang baik sangat ideal apabila dicampur terlebih dahulu dengan pupuk kimia sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk.
- b) Mempengaruhi sifat kimia tanah. Kapasitas tukar kation (KTK) dan ketersediaan hara meningkat dengan penggunaan bahan organik. Asam yang dikandung humus akan membantu meningkatkan proses pelapukan bahan mineral.
- c) Mempengaruhi sifat biologi tanah. Bahan organik akan menambah energi yang diperlukan kehidupan mikroorganisme tanah. Tanah yang kaya bahan organik akan mempercepat perbanyakan fungsi, bakteri, mikro flora dan mikro fauna tanah lainnya.
- d) Mempengaruhi kondisi sosial. Daur ulang limbah perkotaan maupun pemukiman akan mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan penyediaan pupuk organik. Meningkatkan lapangan kerja melalui daur ulang yang menghasilkan pupuk organik sehingga akan meningkatkan pendapatan.

Produksi pupuk organik, tidak seperti halnya pupuk mineral, biasanya berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat dilakukan aplikasi pupuk organik. Pada umumnya produksi dan konsumsi pupuk organik berasal dari satu tempat yang sama. Hal ini berkenaan dengan proses daur-ulang semua limbah organik dan kotoran ternak dalam lingkungan atau petak usaha tani menjadi bahan

kompos. Proses produksi semacam ini sedikit bahkan sama sekali tidak menggunakan masukan dari luar. Kualitas dari produk akhir pupuk organik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas bahan masukan, pengetahuan dan pengalaman petani, kondisi iklim, tradisi, dan budaya setempat (Sutanto, 2002).

Berdasarkan atas berbagai fakta yang dikemukakan oleh para pakar dan sumber informasi yang lain yang berkaitan dengan kelembagaan atau organisasi, maka dari aspek administrasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah spesifikasi produk akhir pupuk organik. Petani sebagai konsumen akan memperhatikan kandungan hara dan air (Sutanto, 2002).

Penetapan standar pupuk organik perlu juga diperhatikan masalah pengemasan dan pelebelan (Sutanto, 2002). Label kemasan produk pupuk organik paling tidak harus mencantumkan:

- a. Nama dan alamat produsen pupuk organik.
- b. Berat kemasan
- c. Kandungan hara makro dan mikro
- d. Kandungan air
- e. Kandungan bahan organik; dan
- f. Informasi lain yang diperlukan dan cukup gayut sehingga konsumen mempunyai minat untuk membeli produk pupuk organik.

2.2 Kemitraan

Kemitraan merupakan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik (Raharjo, 2018).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

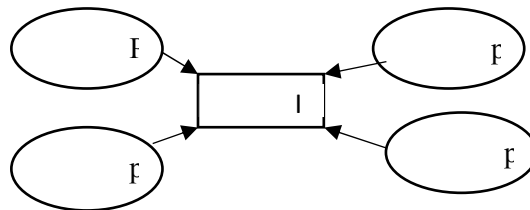
2.2.1 Pola kemitraan

Batasan kemitraan usaha yang dipublikasikan dalam berbagai tulisan adalah hubungan bisnis usaha yang melibatkan satu kelompok orang/badan hukum dengan satu atau sekelompok atau beberapa kelompok orang/badan dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan yang terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling memerlukan, dan saling melaksanakan etika bisnis (Hafsah, 2000).

Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan yaitu:

a. Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini perusahaan menengah dan perusahaan besar, dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.



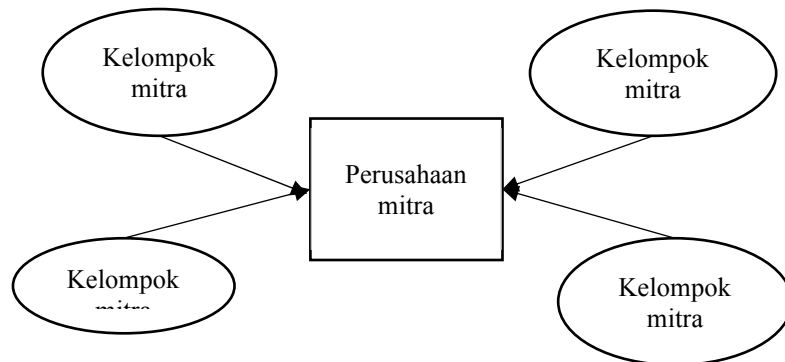
Gambar 3. Pola Kemitraan Inti Plasma

Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti berperan menampung, memberi pelayanan, bimbingan kepada petani, kelompok tani dan kelompok mitra. Menurut Dillon (1994), pola kemitraan usaha antara perusahaan menengah atau besar sebagai inti dan petani sebagai plasma dilandasi oleh falsafah inti-plasma, analog dengan kehidupan biologik sel, yaitu inti merupakan bagian kecil dari sel menentukan hidup dan aktivitas seluruh sel, sedangkan plasma merupakan bagian terbesar dari sel berfungsi melindungi, menyangga dan memasok kebutuhan inti.

b. Pola Sub kontrak

Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari

produksinya. Bagan skematis pola kemitraan subkontrak disajikan pada Gambar 4.

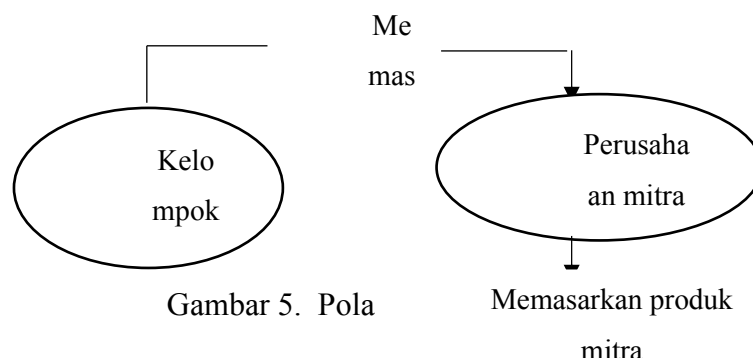


Gambar 4. Pola Kemitraan Subkontrak

Menurut Muhammad Jafar Hafsah (2000), dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

c. Pola Dagang Umum

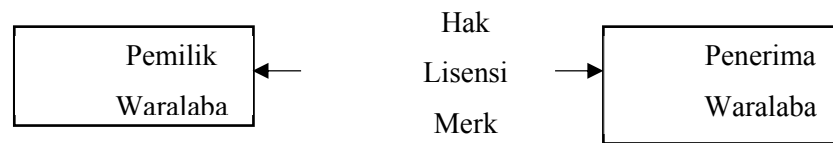
Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Pola dagang umum dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Pola

d. Pola Keagenan

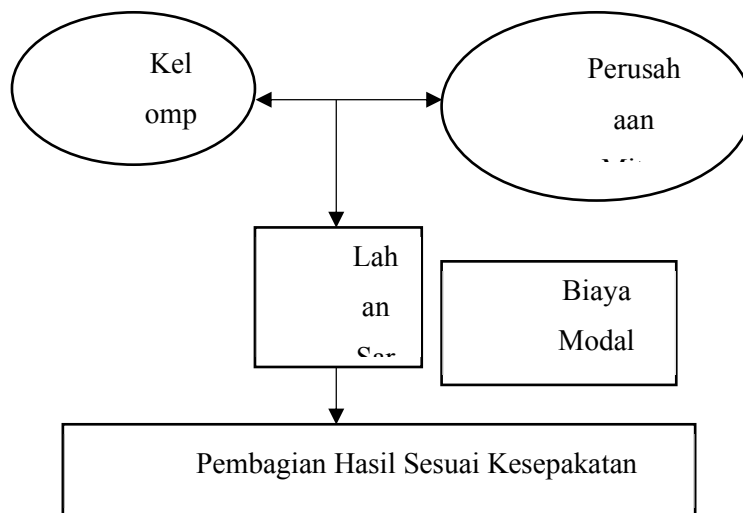
Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perpisahan mitra yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Di samping itu pola waralaba dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas, sedangkan kelemahannya apabila salah satu mitra ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan akan terjadi perselisihan. Pola kemitraan waralaba dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Pola Kemitraan Waralaba

e. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis

Pola Kerjasama Operasional Agribisnis adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan pemisahaan mitra usaha yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal usaha dengan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis

2.2.2 Prinsip kemitraan

Menurut Raharjo (2018), terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awala dijalinnya kemitraan sampai berakhir kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan (mitra).

3. Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan diharapkan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan diharapkan akan menjadi efisien dan efektif karena dilakukan secara bersama.

2.2.3 Jenis kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

1. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

2. *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

3. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti *program delivery* dan *resource mobilization*.

4. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penmabahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam: SK bersana, MOU, Pokja Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/perjanjian kerja.

2.2.4 Langkah-langkah kemitraan

Membangun kemitraan yang dicita-citakan dan terwujudnya kemitraan yang sehat harus diawali persiapan yang mantap dan ditambah dengan pembinaan. Kemampuan melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya dalam arti harus dibangun dengan sadar dan terencana di mana pun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis (Hafsah, 2000). Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan pelaku-pelaku usaha agar siap bermitra adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar. Dalam tahap identifikasi ini dikumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau komoditas yang akan diusahakan, potensi sumberdaya yang mendukung, tingkat kemampuan para pelaku usaha baik di bidang penguasaan iptek, permodalan, SDM maupun sarana-prasarana lainnya.
- b. Membentuk wadah organisasi ekonomi. Untuk memudahkan komunikasi, kelancaran informasi dan kemudahan koordinasi dalam kemitraan usaha antara pengusaha besar/menengah dengan pengusaha kecil yang belum berbadan hukum dan dalam jumlah yang banyak maka perlu adanya pengorganisasian atau pengelompokan usaha kecil yang sejenis.
- c. Menganalisis kebutuhan pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan permasalahan-permasalahan mendasar dalam pengembangan usaha yang

dihadapi pelaku-pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar.

- d. Merumuskan program. Setelah permasalahan dan peluang-peluang usaha dianalisis, maka dapat disusun program yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, pemberian konsultasi serta peningkatan koordinasi dan lain-lain. Harapan yang ingin dicapai dari berbagai upaya tersebut adalah adanya peningkatan manajerial dan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya di pedesaan, di mana sebagian besar pelaku usaha kecil berada di lokasi tersebut.
- e. Kesiapan bermitra. Pelaku usaha kecil perlu menyadari bahwa kemitraan bukan belas kasihan dari pelaku usaha besar/menengah seperti dalam lembaga sosial yang bersifat cuma-cuma bagaikan “sinterklas”. Hal ini perlu juga disadari oleh pelaku usaha besar bahwa adanya kemitraan dengan usaha kecil juga tidak semena-mena untuk memperoleh keuntungan. Adanya kemitraan harus didasari kedua belah pihak bahwa kemitraan merupakan suatu hubungan kerja dan peluang, dan juga menjadi ajang untuk belajar dan mengembangkan diri serta menimba kekuatan/kelebihan-kelebihan yang dimiliki mitra usahanya. Selain itu, pelaku-pelaku usaha yang akan bermitra perlu memahami benar bahwa kemitraan memerlukan adanya keseimbangan yang jelas antara kontribusi, proses partisipasi yang melibatkan semua pihak serta pembagian hasil yang sepadan sesuai kontribusi. Semua pihak memberikan kontribusi, menata proses partisipasi, serta memperoleh pembagian hasil atau pembagian keuntungan sesuai kontribusinya.
- f. Temu Usaha. Kegiatan ini mempunyai tujuan mempertemukan pelaku-pelaku usaha yang telah siap bermitra. Pada ajang pertemuan ini, kedua pihak mulai saling mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Pada kesempatan itu juga dapat dipertemukan secara langsung pemilik modal dan pihak perbankan dengan usaha kecil. Harapan yang dicapai dari pertemuan itu adalah adanya kontrak kerjasama antara pelaku-pelaku usaha yang akan bermitra dan juga berkembangnya komoditi unggulan yang diminta pasar.

- g. Adanya Koordinasi. Berkembangnya suatu kemitraan tidak terlepas dari adanya dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan usaha di daerah. Dukungan fasilitas atau kemudahan perizinan (debirokratisasi dan deregulasi), perangkat kebijakan perkreditan, tingkat suku bunga, peraturan daerah dan kemudahan-kemudahan lainnya sangat membantu proses kemitraan. Dalam mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya koordinasi dan persamaan persepsi antar lembaga/instansi terkait mulai dari tingkat pusat (nasional) sampai ke tingkat daerah (kabupaten).